BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek tersebut dan setelah penulis menganalisis, memahami, dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil kegiatan beberapa diantaranya yaitu :

1. Prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan pada Biro Keuangan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sudah cukup baik karena telah sesuai pedoman yang telah diambil yaitu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan adanya dokumen – dokumen dan catatan pendukung seperti STS, surat tanda bukti pembayaran, buku kas umum penerimaan, surat ketetapan retribusi daerah, dan buku rekapitulasi harian agar proses penginputan data ke dalam laporan realisasi anggaran pendapatan menjadi lebih mudah dan sudah dibedakan sesuai dengan pendapatanya masing – masing.
2. Dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan, pemerintah provinsi Jawa Barat mampu membagi menjadi 8 bagian berdasarkan media pelaporannya yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), biro keuangan, bank, bagian kas daerah, bagian akuntansi dan pelaporan, DPRD dan BPK.

Sehingga memudahkan karyawan dan proses pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan. Selain itu, dalam pelaksanaan penyusunannya, biro keuangan bagian akuntansi dan pelaporan telah memanfaatkan teknologi komputer dengan menggunakan aplikasi *Microsoft excel*.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk peningkatan serta kelancaran dalam prosedur Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bandung, diantaranya :

1. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan Pelaporan sudah cukup baik dan konsisten dengan prosedur yang sudah ada. Namun, sebaiknya SKPD/OPD dapat meminimalisir keterlambatan penyetoran dokumen dan catatan sehingga penyusunan pembuatan laporan realisasi anggaran pendapatan dapat lebih efektif.
2. Dalam melakukan teknis pelaksanaan prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggraan (LRA) Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik, tetapi penulis menyarankan agar perlu ditingkatkan lagi ketelitian dalam menginput data agar hasilnya lebih baik dan pada saat diaudit oleh BPK tidak ada kesalahan lagi.